

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada dasarnya pembentukan pemerintahan Indonesia berhubungan erat dengan misi yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, misi tersebut merupakan dasar dari kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Intansi-intansi sebagai pelaksana yang di bentuk pemerintah untuk menangani urusan-urusan pemerintahnya, merupakan salah satu penentu berjalannya misi dengan baik untuk mencapai cita-cita Negara Indonesia yaitu terlindungnya segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, majunya kesejahteraan umum, cerdasnya kehidupan bangsa dan ikut aktifnya Indonesia melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kedamaian abadi dan keadilan sosial (Urip dan Yohanes, 2008) dalam Rahayu (2011).

Hasil kerja intansi pemerintah yang telah dicapai, dalam rangka implementasi urusan pemerintah sesuai bidang pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diketahui melalui informasi tentang akuntabilitas masing-masing intansi pemerintah. Informasi tentang akuntabilitas pemerintah dibutuhkan oleh pemerintah sebagai bahan pengambilan keputusan untuk melakukan perbaikan-perbaikan manajemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang lebih baik.

Informasi tersebut juga diperlukan sebagai dasar penyusunan laporan pertanggungjawaban kepala pemerintah sebagai penyelenggara pemerintah kepada masyarakat melalui DPR/D di setiap akhir tahun anggaran dan diakhir jabatan kepala pemerintah (Urip dan Yohanes, 2008) dalam Rahayu (2011).

Pertanggung jawaban (akuntabilitas) sebagai istilah dalam teori dan praktek tentang kebijakan publik memerlukan penjelasan yang cukup terinci, dimana secara tradisional istilah tersebut memiliki makna sebagai kemampuan untuk memberi jawaban terhadap perilaku atau tindakan seseorang. Secara umum para pegawai publik dan organisasinya hanya dikenai terhadap tanggung jawab tindakan legal saja, hal ini baru diberikan jika diminta oleh pihak yang berwenang, atau dengan kata lain pertanggung jawaban hanya mementingkan segi administrasinya saja, namun pihak publik tidak menganggap bahwa pihak pertanggung jawaban para pegawai publik dan agen-agensya terbatas pada aspek legalitas tindakan formalnya saja, tetapi lebih dari itu yaitu mencakup aspek-aspek lain seperti perilaku organisasi dan profesionalitas, elemen politik dan moralitas tindakan administrasi merupakan aspek penting yang juga perlu pertanggungjawaban para aparatur (Indradi, 2011 : 105).

Dalam akuntabilitas pemerintah kegiatan pemerintah tidak hanya berjalan dengan baik, tapi terdapat kendala-kendala dan permasalahan yang sangat kompleks yang harus diselesaikan oleh pemerintah antara lain, Akuntabilitas Pemerintah yang mengemuka hanya terdapat upaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui aturan-aturan, tetapi lemah dalam peningkatan kemampuan aparat (birokrat) dalam memberikan pelayanan.

Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik menimbulkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik, salah satunya melalui informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan. Dilihat dari sisi internal organisasi, laporan keuangan sektor publik merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Sedangkan dari sisi eksternal, laporan keuangan merupakan alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, munculnya tuntutan

dari masyarakat agar organisasi sektor publik mempertahankan kualitas, profesionalisme dan akuntabilitas publik serta value for money dalam menjalankan aktivitasnya serta untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh organisasi sektor publik, maka diperlukan audit terhadap organisasi sektor publik tersebut.

Audit yang dilakukan tidak hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan, namun perlu diperluas dengan melakukan audit terhadap kinerja organisasi sektor publik tersebut (Deddy dan Sherly, 2010) dalam Dewi (2008). Audit kinerja merupakan pengujian sistematis, terorganisasi, dan objektif atas suatu entitas untuk menilai suatu pemanfaatan sumber daya alam memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja (Dewi, 2008).

Uraian diatas menjelaskan bahwa audit sektor publik bisa memperbaiki kinerja entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik. Fenomena yang terjadi di dalam audit kinerja sektor publik diantaranya yaitu harus disadari bahwa saat ini masih terdapat beberapa kelemahan dalam melakukan audit pemerintah di Indonesia. Kelemahan pertama bersifat intern sedangkan kelemahan kedua bersifat struktural. Kelemahan pertama adalah tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar mengukur kinerja pemerintah. Kelemahan kedua adalah masalah kelembagaan audit Pemerintah Pusat dan Daerah yang *overlapping* satu dengan lainnya, sehingga pelaksanaan pengauditan tidak efisien dan tidak efektif (Rinddy, 2010).

Fenomena yang terjadi pada hal ini ada dalam jurnal penelitian Budi Mulyana yang mengutip dari penelitian yang serupa dilakukan oleh Steccolini (2002) yang meneliti tentang hubungan penyajian laporan tahunan pemerintah daerah dengan akuntabilitas: apakah laporan tahunan tersebut merupakan medium untuk akuntabilitas.

Sampel penelitiannya adalah sejumlah pemerintah daerah di Italia. Analisis dari hasil penelitiannya menyebutkan bahwa laporan tahunan nampaknya digunakan untuk pelaksanaan akuntabilitas kepada pengguna internal, bahkan tidak jelas apakah laporan tersebut benar-benar dibaca atau tidak. Sementara itu, laporan tersebut tidak mempunyai peranan yang signifikan dalam pengkomunikasian kepada pengguna eksternal, sehingga peranan laporan keuangan aktual dan derajat akuntabilitas di pmda-pmda perlu ditanyakan (Mulyana, 2006).

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPK bahwa laporan keuangan Kota Gorontalo tahun anggaran 2009 dan 2010 yang dikutip dari Pakaya (2012), BPK memberikan opini “Wajar Dengan Pengecualian” atau *Qualified Opinion*, BPK berpendapat bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP, namun terdapat keadaan tertentu yang berkaitan dengan yang dikecualikan yaitu : 1) Sebagaimana dijelaskan dalam Temuan Pemeriksaan nomor tiga pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, penyajian Investasi Non Permanen Dana Bergulir sebesar Rp1.788.384.902,00 pada neraca tidak disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan berpotensi tidak tertagih. 2) Sebagaimana dijelaskan dalam Temuan Pemeriksaan nomor enam pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, penatausahaan barang milik daerah di SKPD dan Bagian Aset DPPKAD tidak tertib sebesar Rp580.581.466.375,20 sehingga penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2009 tidak dapat diyakini kewajarannya. 3) Sebagaimana dijelaskan dalam Temuan Pemeriksaan nomor delapan pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, realisasi Belanja Bantuan Sosial dan Hibah digunakan tidak sesuai ketentuan sehingga pada Laporan Realisasi Anggaran TA 2009 disajikan lebih sebesar Rp1.786.525.000,00. 4) Sebagaimana dijelaskan dalam Temuan

Pemeriksaan nomor sebelas pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern, penyajian perbedaan saldo akhir SILPA TA 2007 dan saldo awal SILPA TA 2008 sebesar Rp2.806.293.816,52 belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga terdapat potensi adanya ketidakabsahan belanja Tahun 2007 yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian Kas, Utang PFK dan Ekuitas Dana Lancar SILPA per 31 Desember 2009. Berdasarkan temuan-temuan dari BPK tersebut mengindikasikan masih lemahnya audit kinerja yang dilakukan oleh Pemkot Gorontalo. Berdasarkan wawancara pada salah satu staf pada DPPKAD Kota Gorontalo, penerapan audit kinerja pada Pemkot Gorontalo belum sepenuhnya dilaksanakan, masih perlu adanya pembenahan, sehingga sampai saat ini audit kinerja yang dilakukan oleh Pemkot Gorontalo, hanya terbatas pada audit keuangan dan kepatuhan saja.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Rahayu (2011) pengaruh audit kinerja sektor publik dan pengawasan fungsional terhadap akuntabilitas public (pada SKPD di pemerintah kota Cimahi). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara audit kinerja dan pengawasan fungsional dengan akuntabilitas publik. Sedangkan koefisien determinasi menunjukkan bahwa secara bersama-sama audit kinerja dan pengawasan fungsional memberikan sumbangan terhadap variabel terikat (akuntabilitas publik). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rahayu (2011) selain pada obyek penelitian, penelitian ini hanya mengambil audit kinerja sebagai variabel X dan Akuntabilitas publik sebagai Y

Maka dari penjelasan diatas penulis mengambil judul **“Pengaruh Audit Kinerja terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Gorontalo**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Belum efektif dan efisien dalam pelaksanaan audit kinerja pada pemerintah saat ini.
2. Banyaknya temuan-temuan atas kasus ketidak patuhan terhadap ketentuan yang berlaku oleh BPK, membuktikan pelaksanaan audit kinerja pemerintah Kota Gorontalo belum dilaksanakan secara optimal.

1.3 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang diuraikan diatas penulis dapat merumuskan masalah yaitu seberapa besar pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik pada pemerintah Kota Gorontalo?.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk menguji dan mengetahui seberapa besar pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik Pada pemerintah Kota. Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Akademis

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini akan memberikan wawasan pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik baik secara teori maupun secara praktek.

2. Bagi pihak- pihak yang memerlukan

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan informasi yang bermanfaat serta dapat dijadikan judul dalam penyusunan laporan usulan penelitian.

1.5.2 Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan dan dasar bagi DPPKAD Kota Gorontalo tentang pengaruh audit kinerja terhadap akuntabilitas publik.